

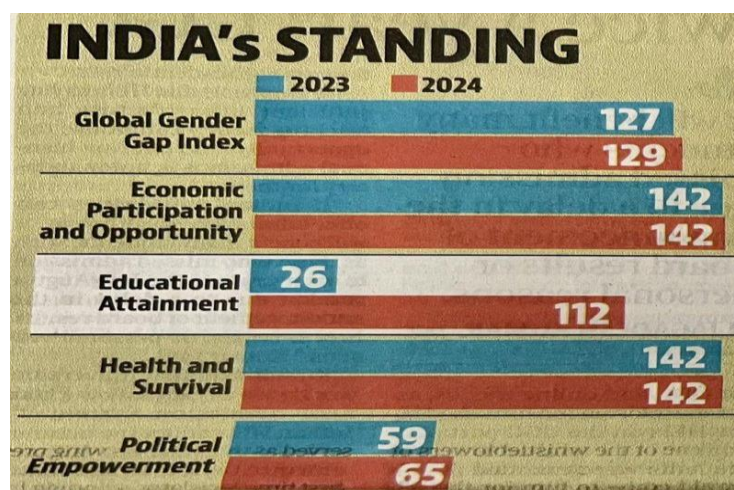
BAB II

GAMBARAN UMUM HUBUNGAN GENDER DALAM MASYARAKAT INDIA DAN FENOMENA *BRIDE TRAFFICKING*

2.1 Permasalahan Ketidaksetaraan Gender dalam Masyarakat India

Permasalahan kesetaraan gender merupakan tantangan serius yang dialami hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali India. Dalam *Global Gender Gap Report 2024* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF), India menempati peringkat ke-129 dari 146 negara, yaitu dua peringkat lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Kemudian, terdapat penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya dalam sektor pencapaian pendidikan, dimana India menempati peringkat ke-112 dengan tingkat kesenjangan literasi laki-laki dan perempuan yang cukup signifikan yaitu mencapai angka 17,2% (WEF, 2024).

Gambar 2. 1 Peringkat India dalam Global Gender Gap Report 2023-2024



(Sumber: Hindustan Times, 2024)

Isu ketidaksetaraan gender di India sedikit banyak disebabkan oleh penafsiran peran tertentu untuk laki-laki dan perempuan yang digambarkan dari nilai konservatif yang terdapat dalam tradisi dan budaya turun temurun yang dipegang masyarakat India. Hambatan tradisi dan budaya India terus menerus menyangkal hak-hak dasar bagi perempuan di India. Persepsi dan keyakinan budaya yang mengasosiasikan perempuan dengan peran utama untuk melayani laki-laki sejak lahir telah menempatkan perempuan pada kedudukan yang rendah di masyarakat. Perempuan di India secara tradisi memegang empat rangkaian peran: anak perempuan, istri, ibu rumah tangga dan ibu. Sejak usia dini, anak perempuan disosialisasikan ke dalam pekerjaan rumah tangga dimana mereka dibuat percaya bahwa peran utama mereka berputar pada aktivitas domestik untuk melayani anggota keluarga khususnya laki-laki, sedangkan anak laki-laki diasosiasikan dengan peran-peran yang maskulin sebagai pewaris keluarga sehingga mereka dapat memegang kendali di rumah dan melakukan aktivitasnya secara bebas di ruang publik (Buongpui, 2013).

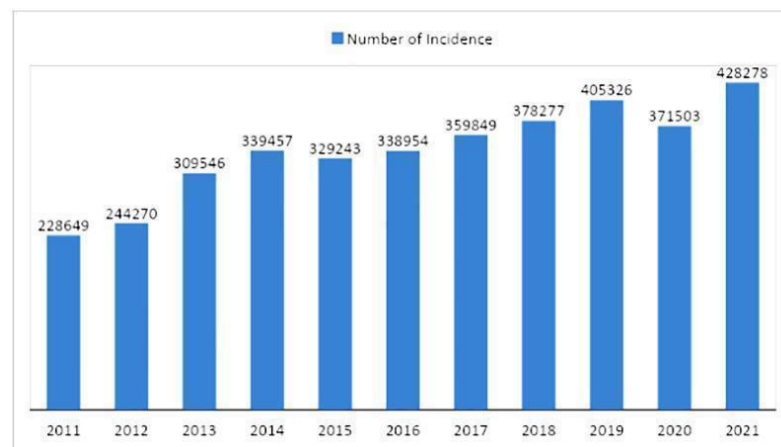
Kondisi ini menggambarkan bahwa laki-laki di masyarakat India memegang kuasa dan otoritas di atas perempuan, sehingga perempuan tidak mendapatkan hak dan kebebasannya, serta termarginalisasi. Meski begitu, ketimpangan relasi kuasa gender di masyarakat India terus berlanjut karena baik laki-laki sebagai pihak dominan maupun perempuan sebagai pihak subordinat, secara tidak sadar menerima struktur sosial ini karena begitu mengakar dari budaya turun temurun masyarakatnya (Kabeer, 1994; Ganghadaran 2008). Akibatnya, ketidaksetaraan gender menjadi hal yang tidak dapat dihindari perempuan India.

Ketidakberdayaan perempuan akan kuasa yang dimiliki laki-laki, kemudian membuat perempuan menjadi rentan akan kekerasan berbasis gender dan bentuk-bentuk diskriminasi.

2.2 Bentuk Diskriminasi Perempuan di India

Ketimpangan atau diskriminasi kekuasaan berbasis gender termanifestasi dalam berbagai bentuk praktik sosial-budaya yang dipertahankan masyarakat India sehingga melancarkan terjadinya aksi-aksi kekerasan berbasis gender yang menjadikan perempuan sebagai korban. Akibatnya, angka kekerasan terhadap perempuan di India terus mengalami lonjakan tiap tahunnya. Berikut data kekerasan terhadap perempuan India tahun 2011-2021:

Gambar 2. 2 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan di India Tahun 2011-2021

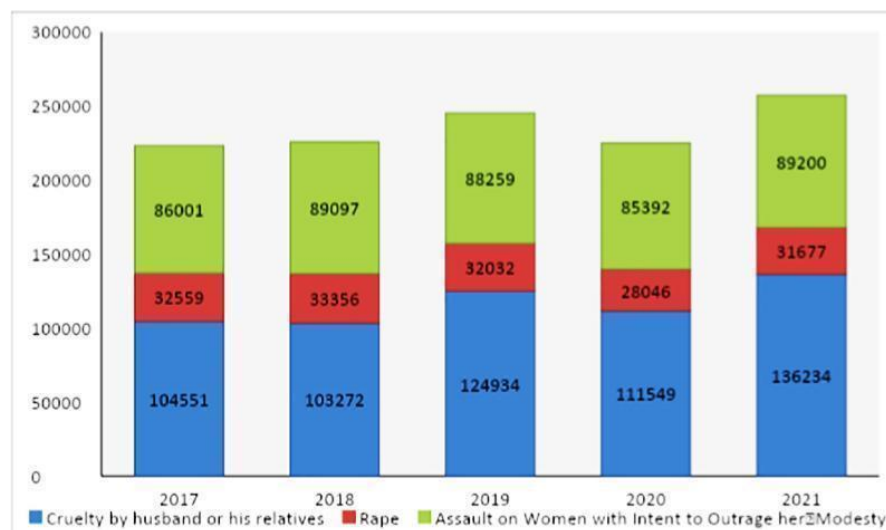


(Sumber: NCRB, 2021)

Gambar di atas merupakan data kekerasan terhadap perempuan yang diambil dari laporan *National Crime Record Bureau* (NCRB) India. NCRB menyatakan bahwa selama 11 tahun sejak tahun 2011 hingga 2021, angka

kekerasan terhadap perempuan telah meningkat dari 228.649 kasus per tahun menjadi 428.278 kasus pada tahun 2021. Rata-rata terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan sebesar 5,6 persen pertahun. Namun, data dari tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil yang bertentangan dimana pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan sebesar 8,3 persen, dari 405.326 kasus pada tahun 2019, menjadi 371.503 kasus pada 2020. Sementara pada tahun 2021, jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 15,3 persen dari tahun 2020. Perempuan di India mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dikategorikan ke dalam *Indian Penal Code (IPC)* dan *Special Local Laws (SLL)* (NCRB, 2021).

Gambar 2. 3 Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam IPC Tahun 2017 - 2021



(Sumber: NCRB, 2021)

Dari data yang ditampilkan oleh NCRB India di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan telah berfluktuasi secara drastis. Dimana persentase tertinggi tiap

tahunnya dilaporkan dalam kategori ”kekerasan oleh suami atau kerabat”, dengan persentase tertinggi pada tahun 2021, yaitu 31,8 persen dengan jumlah 136.234 kasus (NCRB, 2021). Namun, angka tersebut bukanlah angka ’sesungguhnya’, banyak kasus kejahatan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan khususnya dalam ranah rumah tangga karena adanya *culture of silence* dimana perempuan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena dipercayai sebagai aib dan mempermalukan keluarga (Siswanto, 2020).

Tingginya kekerasan terhadap perempuan di India merupakan manifestasi dari budaya dan tradisi masyarakat India yang didominasi laki-laki merugikan perempuan. Beberapa praktik tradisi dan budaya yang menjadi bukti bahwa masyarakat India mengutamakan hak laki-laki dibanding perempuan, yakni tradisi *dowry* (mahar), preferensi terhadap anak laki-laki, serta *female foeticide* dan *infanticide*.

2.2.1 Permasalahan terkait Tradisi Pemberian Mahar atau Dowry

Tradisi pemberian *dowry* atau mahar oleh pihak calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki merupakan tradisi yang telah hadir kurang lebih sejak abad ke-13 Masehi dan berlanjut secara turun temurun di India. Dalam sejarahnya, pemberian *dowry* oleh pihak pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dalam pernikahan mulanya hanya dilakukan oleh masyarakat kasta atas yang memiliki status sosial yang tinggi yaitu kasta Brahmana, sebagai simbol penerimaan pengantin perempuan di keluarganya yang baru yaitu keluarga pengantin laki-laki dan

bentuk penghormatan kepada pengantin laki-laki, selain itu *dowry* juga memiliki fungsi *financial security* bagi perempuan (Cikita, Nizmi, & Olyvia, 2023; Siswanto, 2020).

Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman fungsi *dowry* perlahan berubah. *Dowry* yang semula merupakan pemberian orang tua untuk kepemilikan pengantin perempuan, kini dikuasai dan dipahami menjadi hak milik pengantin laki-laki yang wajib dipenuhi pihak pengantin perempuan. Perubahan ini disebabkan oleh kebijakan terkait kepemilikan properti yang dibuat pada masa kolonial Inggris yang berkuasa pada tahun 1793. Kebijakan ini memberikan hak milik segala jenis properti hanya kepada laki-laki, sehingga warisan dalam bentuk properti oleh orang tua hanya bisa diberikan kepada laki-laki. Dengan demikian perempuan tidak mendapatkan haknya untuk memiliki bagian dari warisan keluarga secara langsung, karena orang tua harus memberikannya melalui pihak pengantin laki-laki sebagai *dowry*. Selain itu, kolonial Inggris membuat peraturan dimana sistem *dowry* diwajibkan untuk melangsungkan pernikahan (Mayer, 2022; Oldenburg, 2002; Siswanto, 2020)

Dewasa ini, kewajiban tradisional pemberian mahar oleh perempuan seringkali menimbulkan permasalahan yang mendiskriminasi dan mencelakai hak perempuan di India. Meski telah dinyatakan ilegal sejak tahun 1961, tradisi *dowry* sudah menjadi kebiasaan yang hampir universal di India sehingga praktik ini masih terus berlaku dan sulit dihilangkan dalam masyarakat (Mayer, 2022). Permintaan atau tuntutan *dowry* oleh pihak

pengantin laki-laki yang semakin besar menempatkan perempuan di posisi yang sulit dan dirugikan. Ketika tuntutan *dowry* tidak bisa langsung dilunasi, maka pelunasan berlangsung bahkan setelah pernikahan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya perlakuan buruk seperti ancaman, penindasan dan kekerasan fisik terhadap pengantin perempuan oleh keluarga suami. Kekerasan terhadap perempuan akibat tradisi *dowry* di India menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai *dowry death/dowry murder* dan *bride burning* (Kurnia, Rizki, & Zulkarnain, 2023; Banerjee, 2014).

Dowry death/dowry murder atau kematian akibat permasalahan mahar adalah fenomena pembunuhan atau paksaan bunuh diri yang dialami pengantin perempuan ketika tidak dapat melunasi permintaan mahar yang diajukan pihak pengantin laki-laki. Sementara *bride burning* adalah bentuk kekerasan akibat mahar yang paling sering dilakukan untuk membunuh pengantin perempuan, karena akan mempersulit penyelidikan terkait penyebab kematian. Jumlah kasus *dowry death* yang dilaporkan tiap tahunnya masih sangat tinggi. Menurut data NCRB, pada tahun 2018 terdapat 7.167 laporan terkait kasus *dowry death*, kemudian selama 5 tahun hingga tahun 2022, angka kasus *dowry death* terus mengalami penurunan yaitu 6.450 laporan kasus pada tahun 2022 (NCRB, 2018-2023). Meski terdapat penurunan jumlah kasus, angka ini masih tergolong cukup tinggi.

2.2.2 Preferensi terhadap Anak laki-laki

Bahkan sejak masa India Kuno, anak perempuan di keluarga India telah menduduki tempat yang lebih inferior atau di bawah anak laki-laki. Hal ini menyebabkan kehadiran anak perempuan kurang bahkan tidak diharapkan oleh keluarga. Sebaliknya, keinginan untuk memiliki setidaknya satu anak laki-laki mengakar sangat kuat dalam budaya India. Di masyarakat patrilineal seperti di India, hanya keturunan laki-laki yang dapat meneruskan nama keluarga, melanjutkan garis keturunan, dan dengan demikian, menjaga status sosial keluarga. Maka dari itu, perempuan dianggap harus melahirkan anak laki-laki sebagai bagian dari pencapaian diri mereka sebagai perempuan (Klaus & Tipandjan, 2014).

Selain itu, preferensi terhadap anak laki-laki sering kali didorong oleh alasan ekonomi dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat patriarkal, anak laki-laki diharapkan tinggal di rumah keluarga mereka dan mendukung orang tua secara ekonomi sepanjang hidup mereka, termasuk saat orang tua sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi. Sebaliknya, ketika anak perempuan menikah, mereka pindah ke rumah suami, menyebabkan orang tua mereka kehilangan sumber pendapatan dan jaminan keamanan, meskipun hubungan emosional tetap ada. Biaya yang harus dikeluarkan untuk anak perempuan umumnya lebih besar, tidak hanya karena pendidikan dan pengasuhan mereka, tetapi juga karena biaya mahar dan pernikahan yang signifikan (Vlassoff, 2013).

Pada tahun 2008, diperkirakan ada sekitar 250.000 "anak perempuan yang hilang" di India, artinya, jumlah bayi perempuan yang lahir sangat jauh dari jumlah yang seharusnya lahir secara alami (Vlassoff, 2013). Ini menunjukkan bahwa perempuan di India telah didiskriminasi bahkan sejak lahir akibat kepentingan untuk memiliki anak laki-laki dibanding perempuan.

2.2.3 Female Foeticide dan Infanticide

Female foeticide adalah fenomena aborsi selektif yang dilakukan terhadap janin bayi perempuan, sedangkan *female infanticide* adalah pembunuhan bayi perempuan secara sengaja setelah lahir atau dalam kurun waktu satu tahun pasca kelahiran bayi perempuan. Praktik ini telah dilakukan di India sejak lama akibat kewajiban tradisional, norma-norma dan nilai konservatif yang bersifat diskriminatif dan diarahkan kepada perempuan (Kohli, 2017). Tradisi *dowry* yang diwajibkan kepada perempuan dianggap memberatkan keluarga sehingga sejak lahir anak perempuan hanya akan dianggap menjadi beban bagi keluarga. Selain itu, preferensi terhadap anak laki-laki seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya juga menjadi penyebab keluarga melakukan praktik *female foeticide* dan *infanticide*.

Praktik ini kemudian menyebabkan terganggunya rasio kelahiran di India, dimana jumlah kelahiran anak laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan. Dalam sebuah sensus disebutkan bahwa di India pada tahun

1991, terdapat 945 anak perempuan untuk setiap 1000 anak laki-laki, sedangkan pada tahun 2001, jumlah ini menurun menjadi 927 anak perempuan per 1000 anak laki-laki. Ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun 1991 – 2001, jumlah anak perempuan yang lahir atau hidup menurun relatif terhadap jumlah anak laki-laki (Tandon & Sharma, 2006).

2.3 Diskriminasi Perempuan di India dan fenomena *Bride Trafficking*

Berbagai bentuk diskriminasi perempuan yang dimanifestasi oleh praktik tradisi dan budaya di masyarakat di India yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menempatkan perempuan pada posisi yang rentan dan membuat perempuan mudah terjebak skema perdagangan manusia. Salah satu fenomena perdagangan manusia yang menargetkan perempuan dan anak perempuan adalah perdagangan pengantin atau *bride trafficking*. Sub-bab ini akan menjelaskan gambaran umum fenomena *bride trafficking* di India dan bagaimana respon pemerintah India terkait fenomena *bride trafficking*.

2.3.1 Sekilas tentang *Bride Trafficking* di India

Bride trafficking atau perdagangan pengantin adalah salah satu bentuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dengan tujuan untuk dinikahkan. Fenomena *bride trafficking* dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia karena memiliki beberapa aspek kejahatan kemanusiaan berlapis dan berkaitan dengan praktik yang memberlakukan manusia sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Aspek-aspek ini meliputi, perbudakan/kerja paksa, pernikahan anak usia dini, pernikahan paksa (*forced marriage*), dan eksploitasi seksual.

Di India, *bride trafficking* merupakan praktik yang cukup kompleks sehingga terdapat berbagai pandangan yang menunjukkan narasi yang berbeda dalam melihat *bride trafficking*. Beberapa pihak menganggap praktik ini sebagai bentuk pernikahan yang sah dengan situasi yang saling menguntungkan bagi pihak pengantin perempuan dan pengantin laki-laki—dimana perempuan tidak harus mengeluarkan biaya untuk membayar mahar dan pihak laki-laki diuntungkan karena mendapatkan istri (Khan, 2024).

Nyatanya, praktik *bride trafficking* tidak berbeda dengan perdagangan seks, karena perempuan diperlakukan sebagai komoditas yang dijual kepada pria yang tidak dikenal. Fakta bahwa perempuan-perempuan korban *bride trafficking* ‘dibeli’ oleh pihak laki-laki alih-alih menjalankan ‘kewajiban tradisionalnya’ untuk membayar mahar, semakin memperburuk situasi mereka. Perempuan korban *bride trafficking* seringkali hanya diperlakukan sebagai objek seksual serta diperbudak oleh suami dan anggota keluarga pihak suami. Perdagangan pengantin secara sistematis melanggar hak asasi manusia perempuan, termasuk hak atas kehidupan dan keamanan. Perempuan yang diperdagangkan ditempatkan dalam situasi berbahaya yang rentan terhadap kekerasan fisik dan kehilangan hak atas tubuh mereka sendiri.

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Shafiq Ur Rahman Khan, seorang aktivis dan pendiri NGO *Empower People*, menyebutkan bahwa hingga saat ini kasus *bride trafficking* belum diatur secara khusus oleh pemerintah India, sehingga tidak tersedia data resmi terkait jumlah kasus *bride trafficking* di India. Namun, melalui pengalamannya saat turun langsung di lapangan, ia

menemukan bahwa terdapat beberapa kasus dimana orang tua secara sengaja menjual anak mereka akibat tuntutan ekonomi. Di beberapa kasus lain, orang tua korban mengalami penipuan dan dimanipulasi saat berupaya menikahkan anak mereka tanpa mahar (Khan, 2024; Lindén-Tunhult, 2021). Oleh karena itu, perempuan korban *bride trafficking* seringkali adalah korban dari penculikan untuk dinikahkan paksa. Pada tahun 2021 terdapat 3.912 perempuan korban perdagangan manusia yang 5% diantaranya adalah perdagangan manusia dengan tujuan pernikahan paksa (*forced marriage*) yaitu 182 perempuan (NCRB, 2022; Kailash Satyarthi Children's Foundation, 2022).

Gambar 2. 4 Korban Perdagangan Manusia untuk Pernikahan Paksa Tahun 2021

S.No.	Purpose	Total Victims Rescued Under Human Trafficking	
		No. of Victims	% Share to Total Victims rescued
1	Total No. of women victims rescued	3,912	63.0%
2	No. of victims rescued where the purpose of trafficking was 'forced marriage'	182	4.7%

Sumber: Kailash Satyarthi Children's Foundation (2022)

Para korban *bride trafficking* adalah perempuan-perempuan muda yang diperdagangkan dari daerah-daerah miskin di India seperti Assam, Bihar, Jharkhand, Bengal Barat, Orissa, dan bagian selatan India seperti Andhra Pradesh (Banerjea, 2020; Lindén-Tunhult, 2021). Pada tahun 2012, berdasarkan analisis NGO *Empower People* selama kurang lebih 6 tahun, persentase korban *bride trafficking* tertinggi adalah di Bengal Barat yaitu sebesar 23%, kemudian Assam sebesar 17%, dan Bihar sebesar 13%. Perempuan dan anak perempuan dibawa ke

daerah India Utara yaitu Haryana, Punjab, dan Rajasthan untuk dijual sebagai pengantin. Dalam sebuah survey *door-to-door* yang dilakukan oleh NGO *Empower People* pada tahun 2014, terdapat 1352 korban *bride trafficking* yang tinggal bersama keluarga yang membeli mereka di 85 desa di India Utara (theguardian, 2018). Mereka biasa dikenal dengan sebutan atau panggilan kasar yaitu ‘*Paro*’ (perempuan dari luar) dan ‘*Molki*’ (perempuan yang dibeli). *Paro* atau *Molki* merupakan panggilan kasar bagi korban *bride trafficking* yang berarti ‘perempuan yang dibeli untuk beberapa *rupee*’, mereka memiliki kewajiban untuk melayani tidak hanya laki-laki yang menjadi suami mereka, tetapi juga keluarga dan saudara laki-laki dari suaminya, begitu pula dalam hal hubungan seksual (Darma, 2016).

Para perempuan yang menjadi korban perdagangan diperbudak sebagai pekerja di ladang, dan juga mengalami pelecehan seksual serta bahkan dijual kembali kepada laki-laki lain yang kemudian menciptakan pasar baru untuk perdagangan perempuan. Menurut laporan dari *National Crime Records Bureau*, lebih dari 22.000 anak perempuan diculik untuk dinikahkan pada tahun 2012. Laporan tahun 2013 yang dirilis oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melaporkan bahwa bentuk jaringan perdagangan manusia ini telah mulai beroperasi di negara bagian India Utara (UNODC, 2013).

2.3.2 Respon dan Regulasi Pemerintah India terkait Perdagangan Manusia dan Perlindungan Perempuan

India telah meratifikasi Protokol Palermo pada 5 Mei tahun 2011, sembilan (9) tahun setelah penandatanganan pada tahun 2002. Protokol Palermo adalah instrumen global pertama yang mengikat secara hukum dan diakui secara

internasional yang membahas isu *human trafficking* atau perdagangan manusia. Protokol Palermo ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sebagai ‘Protokol untuk menekan dan menghukum perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak’. Definisi perdagangan manusia yang diterima secara luas dan diakui secara global disebutkan dalam Pasal 3 (a) dari Protokol Palermo, yaitu “‘Perdagangan manusia’ berarti perekrutan, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan seseorang untuk memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi. Eksploitasi mencakup, seminimalnya, eksploitasi dengan tujuan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, atau pengambilan organ.” (UN, 2002).

Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, India juga telah mengambil langkah-langkah di tingkat internasional dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1993. Ratifikasi ini menegaskan komitmen India untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip CEDAW dalam hukum domestiknya, yang melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta mewajibkan negara untuk mengambil tindakan aktif dalam melindungi hak-hak perempuan (Putrianti, 2021). Dalam konteks perdagangan manusia, ratifikasi CEDAW mendorong India untuk melakukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya

berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi korban.

Pemerintah India juga berusaha mengurangi kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia di India dengan menciptakan kebijakan atau regulasi terkait berbagai bentuk perdagangan manusia serta perlindungan perempuan dan anak di India. Larangan atas bentuk perdagangan manusia secara tegas diatur pada Konstitusi India Pasal 23 ayat (1), yang menyatakan bahwa perdagangan manusia dan segala bentuk kerja paksa serupa lainnya merupakan pelanggaran yang dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku (Rishi, 2021). Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang diatur pemerintah India terkait permasalahan perdagangan manusia:

Tabel 2. 2 Kebijakan Pemerintah India terkait Perdagangan Manusia

Nama Kebijakan	Tentang
Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (ITPA)	Undang-undang utama yang secara spesifik mengatur pencegahan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersial.
Prohibition of Child Marriage Act, 2006	Undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi hak anak dibawah umur.
The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012	Undang-undang yang mengatur berbagai bentuk pelecehan seksual dan eksploitasi anak.
The Criminal Law (Amendment) Act, 2013	Undang-undang ini mengamandemen Pasal 370 KUHP India (<i>Indian Penal Code</i>) menjadi Pasal 370 dan 370A KUHP yang mengatur tentang tindakan menyeluruh untuk melawan ancaman perdagangan manusia.
The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976	Undang-undang ini mengatur perbudakan, sebuah bentuk perdagangan manusia di mana individu dipaksa bekerja di bawah kondisi eksploitasi.
The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2021 (<i>Pending</i>)	RUU yang diusulkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia secara komprehensif di India, mencakup pencegahan, penyelamatan, perlindungan, dan rehabilitasi korban.
Indian Penal Code Section 360	Undang-undang yang mengatur terkait penculikan perempuan dengan tujuan pernikahan paksa.

(Sumber: Data diolah oleh peneliti)

Tabel diatas memperlihatkan beberapa kebijakan pemerintah India yang mengatur perdagangan manusia dan melindungi khususnya perempuan dan anak dari bentuk-bentuk perdagangan manusia. Beberapa kategori atau klasifikasi

perdagangan manusia disinggung di kebijakan-kebijakan di atas, seperti perdagangan manusia untuk eksploitasi anak, eksploitasi seksual, penculikan untuk pernikahan paksa, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ secara ilegal.

Namun, *bride trafficking* tidak secara spesifik disebutkan dan diatur dalam kebijakan India terkait perdagangan manusia karena praktik *bride trafficking* belum diakui oleh Pemerintah India sebagai bentuk independen dari perdagangan manusia, terlepas dari aspek-aspek kejahatan yang ada di dalam praktiknya. Sementara itu, laporan UNODC tahun 2013 terkait perdagangan manusia di India telah mengakui *bride trafficking* sebagai bentuk independen baru dari perdagangan manusia. Kemudian, *The Global Report on Trafficking in Persons* yang dirilis UNODC pada tahun 2016 juga mengkategorikan perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan pernikahan sebagai ‘bentuk lain’ dalam kategori perdagangan manusia. Keduanya menjelaskan bahwa *bride trafficking* memiliki aspek-aspek yang serupa dengan bentuk perdagangan manusia, seperti eksploitasi seksual, perbudakan, dan lain-lain.

Maka dari itu, meski tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur *bride trafficking*, terdapat beberapa kebijakan terkait perdagangan manusia di India menyinggung aspek terkait *bride trafficking*, meski tidak secara keseluruhan. Misal, *Prohibition of Child Marriage Act, 2006*; dan *The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012*, yang mengatur perlindungan anak dalam hal pernikahan di bawah umur dan eksploitasi seksual, mengingat keduanya berkaitan erat dengan fenomena *bride trafficking*, dimana pernikahan anak dibawah umur

seringkali mengarah kepada perdagangan manusia terutama ketika anak dipaksa ke dalam situasi eksploitasi.

Kemudian, *Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976*, merupakan salah satu kebijakan yang mengatur terkait perbudakan dimana seorang individu dieksploitasi untuk melunasi hutang. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan *bride trafficking* di dalamnya, UU ini menyinggung salah satu aspek *bride trafficking*, karena *bonded labour* atau perbudakan sangat relevan dalam hal perdagangan manusia seperti fenomena *bride trafficking*.

Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (ITPA) merupakan satu-satunya undang-undang yang secara khusus menangani perdagangan manusia di India, tetapi undang-undang ini tidak mampu mendefinisikan fenomena *bride trafficking*. ITPA hanya menangani kasus-kasus perdagangan manusia yang berkaitan dengan prostitusi dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan tidak mencakup jenis perdagangan manusia yang lain seperti perdagangan organ, perdagangan pengantin (*bride trafficking*), perdagangan untuk kerja paksa dan sebagainya.

Pasal 370 KUHP India setelah amandemen *The Criminal Law (Amendment) Act, 2013* menjadi Pasal 370A KUHP memberikan definisi serta langkah-langkah komprehensif terkait ancaman perdagangan manusia dan aspek-aspek perdagangan manusia, yang mencakup tindakan seperti perdagangan anak untuk eksploitasi dalam bentuk apapun termasuk eksploitasi fisik maupun seksual, perbudakan, dan pengambilan organ secara paksa. Meskipun cukup komprehensif, pasal ini masih belum mendefinisikan *bride trafficking*.

Sementara itu, Pasal 366 KUHP India yang mengatur terkait penculikan perempuan dengan tujuan pernikahan paksa diluar kehendak atau melalui paksaan, dapat menjadi pasal yang penting untuk mempengaruhi dan membantu dalam mengatasi kasus-kasus fenomena *bride trafficking*, meskipun tidak secara gamblang menyebutkan *bride trafficking* di dalamnya. Tetapi pasal ini seringkali disalahgunakan, terdapat banyak kasus penangkapan yang terdaftar di bawah pasal ini yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pernikahan paksa, tetapi lebih berkaitan dengan aspek kawin lari.

2.4 Kemunculan NGO *Empower People* dalam Upaya Menanggulangi Isu *Bride Trafficking* di India

Fenomena *bride trafficking* yang semakin memprihatinkan ditambah lemahnya hukum dan kebijakan terkait *bride trafficking* mendorong lahirnya gerakan dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berusaha mengisi *gap* yang tidak berhasil diisi oleh pemerintah India. Selain itu, kehadiran gerakan dan organisasi adalah cara yang tepat untuk memobilisasi perjuangan perempuan dalam upaya mendapatkan hak-hak sipilnya yang dirampas dari praktik seperti *bride trafficking*, serta untuk mencapai kedudukan yang setara dengan laki-laki.

Salah satu organisasi non-pemerintah di India yang muncul akibat keprihatinan atas rentannya perempuan di India terhadap skema perdagangan manusia adalah *Empower People*. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan pendiri NGO *Empower People*, Shafiq Ur Khan, pada 3 Agustus 2024, *Empower People* merupakan satu-satunya NGO di India yang memiliki fokus utama pada kasus *bride trafficking*. Kemunculan NGO ini diawali sebagai sebuah

gerakan *Career Development Center* (CDC) yang awalnya bertujuan untuk menyebarkan pendidikan sebagai program kesadaran di kalangan pemuda dan anak-anak yang terpinggirkan. Kemudian, pada tahun 2005 berubah bentuk menjadi sebuah organisasi non-pemerintah bernama *Empower People* yang memfokuskan gerakannya pada aktivitas *bride trafficking* di India. *Empower People* memiliki lokasi utama di New Delhi dan beroperasi di wilayah-wilayah sumber dan destinasi perdagangan pengantin seperti Assam dan Haryana.

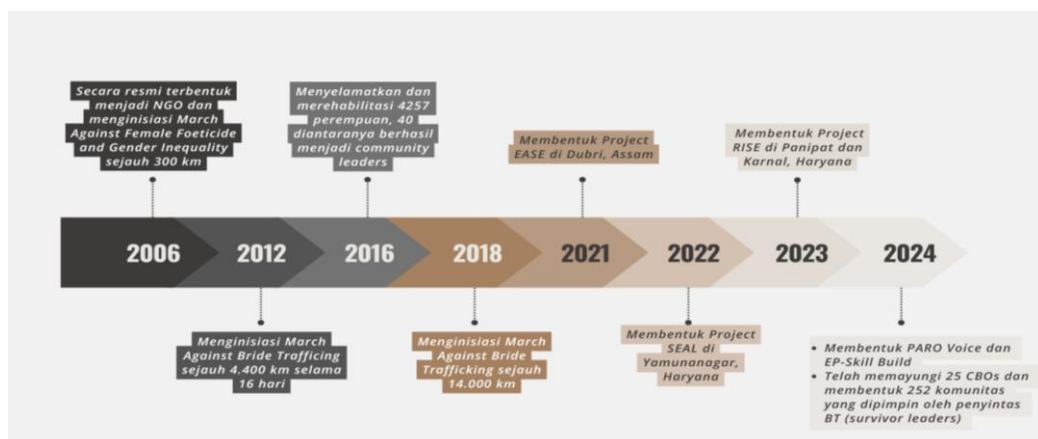
Selain itu, Khan, menyebutkan bahwa selama satu dekade sejak didirikan pada tahun 2006, *Empower People* telah menyelamatkan dan merehabilitasi sekitar 4.257 perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, terlibat dalam 88 kasus pembunuhan atas nama kehormatan (*honor killings*), dan menangani 27.500 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dengan dukungan dari *Empower People*, sekitar 3.200 anak perempuan dapat melanjutkan pendidikan mereka, dan 12.650 anak dari perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia kini bersekolah di 85 desa di 10 negara bagian India (Khan, 2024).

Empower People menggunakan pendekatan berbasis hak yang berfokus pada penyintas atau korban *bride trafficking*, sehingga program yang dijalankan utamanya berfokus untuk mengintegrasikan kembali para korban ke masyarakat umum dan memberikan keterampilan (memberdayakan) agar mereka kembali memegang kendali atas diri dan keputusan mereka yang sempat dirampas dan dibatasi. *Empower People* melihat bahwa pemberdayaan perempuan merupakan hal krusial yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri

perempuan India yang pada dasarnya kerap mengalami diskriminasi dan termarjinalkan, khususnya para penyintas *bride trafficking*.

Empower People juga berupaya mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput. Hal ini dilakukan melalui bermacam upaya intervensi guna mendapatkan dampak jangka panjang, diantaranya adalah: Pelatihan untuk NGO lokal dan *Community-Based Organizations* (CBO) serta pemangku kepentingan di tingkat akar rumput; Pembentukan CBO/kelompok anti perdagangan manusia; Keterlibatan pemerintah daerah; Penyebaran informasi dan pelatihan reporter Berita pedesaan; Pembentukan Komune Penyintas (kolektif penyintas); Intervensi Langsung/Konseling Penyelamatan; Rehabilitasi aman berbasis komunitas; Pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan diri; dan Pengembangan kewirausahaan bagi anak perempuan yang rentan. Sebagai organisasi payung bagi 25 CBO di seluruh negeri, *Empower People* bekerja untuk penghidupan, pembangunan dan partisipasi yang setara untuk mencegah kejahatan sosial seperti kawin paksa dan mengatasi masalah *bride trafficking*. (*Empower People*)

Gambar 2. 5 Milestones kerja Empower People 2006-2024



Sumber: Kompilasi informasi dari *Website Empower People* (2006-2024)